Bali Post

Belasan Komunitas Band Tolak Reklamasi

Bali Post/olo

PARADE - *Aksi panggung parade band di GORMelaya dengan tema Kemerdekaan RI disertai aksi tolak reklamasi.*

Edisi : Sabtu, 25 Agustus 2015

Hal : 12

Bali Post

sambungan - - -

Negara (Bali Post) -

Aksi penolakan Reklamasi Teluk Benoa kembali bergema dari sisi Barat Pulau Bali. Melalui pentas musik di GOR Melaya, Jembrana belum lama ini, para pemuda asal Melaya menyuarakan penolakan mereka terhadap reklamasi. Belasan komunitas band lokal Jembrana unjuk gigi melantunkan lagu-lagu perjuangan dan penolakan reklamasi.

Dengan panggung yang cukup sederhana di lapangan basket GOR Melaya, secara spontan dibentangkan spanduk Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Setiap peserta diwajibkan membawakan satu lagu bertema perjuangan dengan aransemen sendiri. "Sebenarnya ini merupakan even tahunan kami setiap HUT Kemerdekaan RI, secara spontanitas kita gelar parade band. Dan kali ini kami juga menyuarakan penolakan Reklamasi Teluk Benoa," ujar I Ketut Ardika (36) atau Dikok, penggagas acara tersebut. Dikok memiliki alasan tersendiri untuk penolakan reklamasi tersebut. Ardika yang juga dikenal sebagai Ketua Komunitas Independent Army ini bukan hanya menghimpun anak muda untuk berkreativitas dalam bermusik, tetapi juga peduli lingkungan.

Komunitas anak-anak ini pun membentuk komunitas peduli lingkungan yang mereka sebut kelompok Sadar Lingkungan (Darling). Secara berkala komunitas musik ini juga berkontribusi untuk melestarikan lingkungan pantai dan biota laut. Sebelumnya aksi tolak reklamasi ini juga dilakukan dengan spontanitas memasang baliho di Melaya. "Sebenarnya ini sudah yang kedua kalinya, kami ingin menggugah lagi untuk bersama-sama menolak reklamasi," tambahnya.

Dikok memiliki alasan tersendiri melakukan penolakan terhadap adanya reklamasi itu. Selain tidak berpihak pada lingkungan, mereka juga tidak sependapat dengan alasan untuk membuka peluang kerja di Bali. Menurutnya kalau mau jujur tanpa ada penambahan daratan, masih banyak peluang kerja di Bali yang bisa diraup oleh para generasi muda. Tidak harus di sektor pariwisata saja, banyak sektor lain yang bisa dijadikan lapangan kerja asal ada kemauan.

Setelah masing-masing band tampil menyanyikan 2-3 lagu, sejumlah band secara spontanitas bergabung naik ke atas panggung menyanyikan lagu Tolak Reklamasi. Spanduk tolak reklamasi juga dibentangkan. **(kmb26)**

2

Edisi : Selasa, 25 Agustus 2015

Hal : 12

Bali Post

Dewan Minta Kaji Ulang ✓ Penghentian Upah Pungut PBB

Singaraja (Bali Post) –

Kebijakan penghentian pemberian upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada aparat klian dusun (kadus) mulai disikapi kalangan DPRD Buleleng. Lembaga ini langsung meminta agar kebijakan itu dievaluasi kembali. Alasannya, pemberian upah pungut ini untuk menghargai jasa jerih payah aparat kadus. Ia sebagai ujung tombak pengelolaan PBB.

Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Ni. Made Putri Nareni, mengungkapkan hal itu dalam rapat gabungan antara komisi di DPRD dengan eksekutif, membahas APBD Perubahan di gedung dewan, Senin (24/8) kemarin.

Lebih jauh kata Nareni, sejak pemberian upah pungut ini dihentikan banyak kadus mengadukan permasalahan ini kepada lembaga dewan. Bahkan, banyak kadus menolak memungut PBB. Atas kondisi ini, dirinya khawatir kalau bertambah banyak kadus yang merasa putus asa, sehingga pelayanan pungutan pajak pun terganggu. Bahkan, dampak yang lebih luas memunculkan tunggakan PBB, itu karena tidak adanya aparat yang memungut langsung PBB dari wajib pajak.

Saat kebijakan pemberian upah pungut itu berlaku, kadus diberikan upah pungut Rp 70.000. Dari upah pungut ini, kadus yang ditugaskan memungut PBB harus membuka rekening di bank. Pembukaan rekening bank ini pun sepertinya sedikit menyulitkan para kadus. Hal ini karena kadus harus mengisi rekeningnya itu minimal Rp 100.000. Bahkan, banyak di antara mereka harus norok dengan uang sendiri, agar bisa membuka rekening bank. "Saya banyak dapat pengaduan. Sudah banyak pula aparat yang tidak memungut PBB. Ini merupakan bentuk protes mereka karena upah pungut itu awalnya didasarkan persentase," katanya.

Mencegah jangan sampai pungutan PBB itu terganggu, Nareni mengusulkan agar pemerintah daerah yang kini diberikan kewenangan penuh memungut PBB berjuang ke pusat dan mengevaluasi kembali kebijakan itu. Jika solusi itu bisa ditempuh pemerintah, dirinya yakin motivasi dan semangat para kadus memungut PBB di wilayahnya dipastikan bergairah kembali. "Kalau bisa dievaluasi kebijakan ini. Jika itu bisa dilakukan, saya yakin semangat yang sempat padam itu bisa bangkit kembali. Dan kadus bisa membantu memungut PBB. Otomatis hal itu dapat mencegah munculnya tunggakan pajak," imbuhnya.**(kmb38)**

Edisi : Selasa, 25 Agustus 2015

Hal : 11

Bali Post

Kabag Kesra Bantah Ada Pemotongan

Oknum Dewan Diduga Sunat Bansos

Semarapura (Bali Post) –

Lembaga perwakilan rakyat kembali diuji. Setelah adanya pemeriksaan terkait perjalanan dinas, DPRD Klungkung kini diusik dengan dugaan penyunatan bantuan sosial (bansos) yang ditujukan kepada masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Marutha mulai bergerak mengumpulkan data untuk mengungkap penyimpangan anggaran tersebut. Diduga pemotongan bansos yang dilakukan oknum anggota Dewan ini sudah sering terjadi di Kabupaten Klungkung.

Sekretaris Jenderal LSM Marutha, Putu Yudhi Pasek Kusuma, mengungkapkan, pihaknya mendapatkan laporan adanya pemotongan bansos yang dilakukan sejumlah oknum anggota DPRD Klungkung. Meski begitu, pihaknya masih mengumpulkan data terkait laporan yang diterima di bawah. Pemotongan bansos dilakukan pada tahun anggaran 2015, namun bukan berarti pada tahun anggaran sebelumnya tidak terjadi.

Informasi yang diterimanya, pemotongan bansos paling banyak terjadi di Kecamatan Banjarangkan dan Nusa Penida. Jumlah pemotongan bervariasi tergantung dari besarnya bansos yang diterima masyarakat. "Penyunatan bisa mencapai Rp 15 juta untuk bansos yang memiliki nilai Rp 50 juta," bebernya, Senin (24/8) kemarin.

Penyunatan anggaran yang diterima masyarakat ini terjadi pada bansos yang difasilitasi anggota Dewan. Bansos yang seharusnya diatur pembagiannya oleh pihak eksekutif tersebut, beberapa di antaranya dijatah ke anggota DPRD. Laporan yang diterimanya tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan barang bukti. Untuk mengungkap kasus penyunatan bansos ini, pihaknya mengaku masih terkendala pada saksi, mengingat masyarakat yang dipotong bansosnya enggan berkomentar.

Meski begitu, pihaknya optimis laporan yang diterima tersebut dapat terungkap gamblang nantinya. "Kami hanya menginginkan agar Klungkung bersih dari tindak korupsi dan penyimpangan lainnya," ujar pria yang kini terus memantau kasus perjalanan dinas itu.

Saat dikonfirmasi terkait dugaan pemotongan bansos ini, Kabag Kesra Pemkab Klungkung I Wayan Winata menjelaskan, pihaknya tidak menemukan adanya pemotongan dari oknum Dewan saat melakukan monitoring. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat hanya sebagian dari usulan yang diajukan warga. Kekurangan anggaran dapat dipenuhi secara swadaya. Bansos yang disalurkan hanya sebagai dana perangsang dalam kegiatan yang diajukan masyarakat. "Bansos langsung dikirim ke rekening, tidak ada pemotongan, sudah sesuai dengan yang didapat," ungkapnya. **(dwa)**

Edisi : Selasa, 25 Agustus 2015

Hal : 10

Bali Post

Pencairan Bansos dan Hibah Tersendat

Eksekutif Nyatakan Masih Dalam Proses

Gianyar (Bali Post) –

Pemkab Gianyar meminta semua pihak tidak khawatir mengenai pencairan dana bansos dan hibah tahun 2015. Asisten III Setda Gianyar I Wayan Sudamia mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 900/4627/SJ tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada intinya menyebutkan, dana hibah dan bansos yang sudah masuk dalam KUA-PPAS dan APBD induk 2015 bisa diproses untuk dicairkan.

"Untuk bansos tidak ada masalah. Sedangkan untuk hibah, hari Sabtu lalu, sudah kita kumpulkan SKPD yang menangani dana hibah untuk segera melakukan proses selanjutnya," ujar Sudamia yang dikonfirmasi, Senin (24/8) kemarin.

Menurutnya, pada pasal 298 ayat 5 huruf d, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan syarat tambahan di mana penerima dana hibah adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat Pemkab Gianyar ingin mendapat penegasan menyangkut pihak mana saja yang berhak mendapatkan dana tersebut.

Pemkab Gianyar pun kemudian mempertanyakan hal ini dengan melakukan konsultasi ke pusat. Kepastian mengenai penerima hibah ditegaskan kembali dengan diterbitkannya SE Mendagri, di mana Pemkab Gianyar sendiri baru menerima SE itu pada 21 Agustus lalu. Dalam SE itu, pencairan bansos dan hibah dapat dilakukan sepanjang sudah masuk APBD ataupun KUA-PPAS. Di sisi lain, calon penerima juga tidak harus terdaftar di Kemenkumham melainkan cukup terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kabupaten/Kota atau Provinsi melalui Kesbanglinmas.

Terkait pertanyaan legislatif mengenai banyaknya bansos dan hibah yang belum cair, Sudamia mengatakan, semuanya masih berproses. Menurutnya, di awal tahun juga sudah banyak dana hibah yang cair. Untuk itulah, pihaknya meminta semua kalangan khususnya masyarakat bersabar.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Gianyar mempertanyakan proses pencairan dana hibah dan bansos tahun 2015. Pasalnya, sampai saat ini masih terdapat sebagian besar bantuan tersebut yang belum dicairkan sehingga menyebabkan polemik di masyarakat. Dewan menilai, masalah ini muncul lantaran eksekutif khawatir dengan penerapan undang-undang dan aturan baru yang menyebutkan penerima bansos dan hibah harus berbadan hukum.

"Sekarang ini masih belum ada keputusan mengenai pencairan dana hibah dan bansos di APBD induk dan perubahan tahun 2015. Yang di induk 2015 baru sebagian sudah dicairkan, sebagian lagi belum, sehingga ini jadi polemik," kata Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta, Minggu (23/8) lalu. **(kmb25)**

Edisi : Selasa, 25 Agustus 2015

Hal : 19

Bali Post

Penyidikan Kasus CPNS DKP Masuki Tahap Kedua

Jagrem dan Candra Diperiksa

Dua Jam

Tabanan (Bali Post) -

Proses penyidikan kasus pemerasan dan percobaan pemerasan yang dilakukan tersangka Gede Jagrem dan Nyoman Candra Dewi di lingkungan DKP Tabanan, terus digeber Kejaksaan Negeri Tabanan. Kali ini proses penyidikan telah masuk pada pelimpahan tahap II. Senin (24/8) kemarin keduanya dijemput dari LP Tabanan untuk kembali dimintai keterangan guna mengecek kelengkapan berkas sebelum nantinya diserahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum.

Pada saat yang bersamaan, Kejari Tabanan juga mendapat perhatian dari Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada. Namun, baik Penjabat Bupati maupun Kejari sama-sama membantah kunjungan tersebut ada kaitannya dengan pelimpahan tahap II kasus yang menimpa dua mantan petinggi di DKP Tabanan.

"Tidak ada kaitannya. Sebagai penjabat yang baru, saya hanya ingin ada koordinasi yang baik antara forum komunikasi pimpinan daerah. Apalagi jelang pilkada, kami tidak ingin ada percikan kecil yang akhirnya menyengsarakan masyarakat. Saya juga ke Polres, Kodim, dan Pengadilan Negeri," ucap Sugiada.

Sementara dari pantauan di Kejari, terkait pelimpahan tahap II, baik Gede Jagrem maupun Nyoman Candra Dewi masing-masing didampingi pengacara dan mulai diperiksa sejak pukul 10.00 sampai 12.00 wita. Kajari Tabanan Atang Bawono mengatakan, sejauh ini berkas keduanya telah lengkap sehingga memungkinkan untuk mempercepat proses penyidikan. "Saat ini pelimpahan penanganan perkara dari penyidikan ke penuntutan, setelah itu baru kami limpahkan ke pengadilan tipikor," ujarnya.

Disinggung tentang kemungkinan adanya tersangka lain dari hasil pemeriksaan dan alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Kejari Tabanan selama ini, pejabat asal Sukaharjo itu hanya mengatakan, yang bertanggung jawab terhadap kasus ini masih ber-

Edisi : Selasa, 25 Agustus 2015
Hal : 14

Bali Post

sambungan - - -

kutat pada dua orang mantan petinggi di DKP.

Kasi Pidsus Fathur Rochman menambahkan, setelah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, keduanya akan kembali menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. "Dengan ditahannya kembali kedua tersangka selama 20 hari ke depan oleh JPU, artinya perpanjangan masa penahanan dari jaksa penyidik yang semestinya sampai 6 September sudah dihapus," jelasnya.

Selama 20 hari ke depan, pihak jaksa penuntut umum akan mempersiapkan dakwaan untuk nantinya segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor. "Target kami 31 Agustus sudah dilimpahkan ke pengadilan," ucapnya.

Sementara itu, pengacara Jagrem dan Candra Dewi mengatakan, kliennya selalu kooperatif dan tidak mengeluhkan jalannya pemeriksaan. "Kami hanya menunggu jadwal sidang," ujar Agus Guna Putra, S.H., pengacara Gede JG. **(kmb28)**

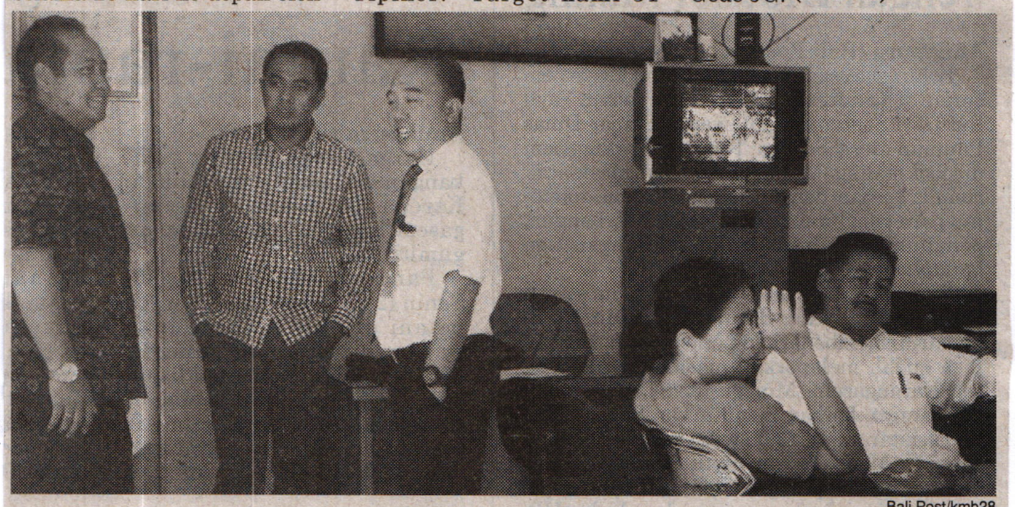

Bali Post/kmb28

LENGKAPI BERKAS - *Kedua tersangka kasus CPNS DKP, Gede Jagrem dan Nyoman Candra Dewi (duduk), melengkapi berkas pelimpahan tahap II di Kejari Tabanan.*

2

Edisi : Selasa, 25 Agustus 2015

Hal : 14